

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DINOYO KOTA MALANG

Asteryna Anandita, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: aster.anandita@yahoo.com

***Abstract: Implementation of Environmental Infrastructure Development as a Form of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo Malang.** Population growth in Indonesia, especially in Java have a very significant improvement but it is not balanced by adequate environmental infrastructure. Saw a very high population growth, Malang City Government to create a programme that aims to improve the environment, enhance citizen empowerment, residential communities, and foster a sense of responsibility as well as improving public participation by forming Community Empowerment Program . the purpose of this research is to know the prpcess of the construction of environmental infrastructure, know the results that have been achieved from the construction of environmental infrastructure, as well as knowing the factors supporting and restricting the execution of Community Empowerment Program in Kelurahan Dinoyo . This research uses descriptive qualitative research methodhs. In conclusion, of the overall program that was implemented in the neighborhood of Dinoyo look indicates success. Residents are excited to participate in development and they want a sustainable development for the future years.*

***Keywords:** development, environmental infrastructure, community empowerment*

Abstrak: Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang sangat signifikan tetapi tidak diimbangi dengan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Melihat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tersebut, pemerintah Kota Malang membuat suatu program yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan perumahan warga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk Program Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pembangunan sarana prasarana lingkungan, mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, dari keseluruhan program yang dilaksanakan di Kelurahan Dinoyo tersebut terlihat menunjukkan keberhasilan. Warga sangat antusias untuk turut serta dalam pembangunan dan mereka menginginkan adanya pembangunan berkelanjutan untuk tahun-tahun ke depannya.

Kata kunci: pembangunan, sarana-prasarana lingkungan, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan nasional yang menciptakan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang kehidupan baik fisik, seperti kemajuan di bidang lingkungan, industri, penyediaan sarana dan prasarana, serta kemajuan-kemajuan di bidang non fisik, seperti keterampilan, pelatihan, dan sebagainya.

Pembangunan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di mana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yaitu dari pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah.

Pembangunan berdampak pada pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia terjadi peningkatan

sekitar 2,5% - 3,5% per-tahun atau dua kali lebih cepat dari pertumbuhan penduduk secara normal. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota di pulau-pulau lainnya. Sampai tahun 2000 separuh lebih penduduk perkotaan berada di Pulau Jawa, padahal luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas seluruh pulau di Indonesia (Kodoatie, 2005, h.24).

Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi suatu kota di Indonesia pada umumnya hampir selalu tertinggal dibandingkan dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Batubara (dalam Budiharjo, 1992, h.91-94), padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan prasarana lingkungan. Padahal sarana dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.

Model pembangunan yang partisipatif adalah pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model tersebut menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1999, h.223). Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengeluarkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/ program tersebut. Pada akhirnya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat,

mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik, melalui lembaga kemasyarakatan seperti LPMK dan BKM. Pada program ini bantuan diberikan untuk pembinaan di tiga aspek kehidupan masyarakat atau Program Tribina, yaitu Bina Sosial, Bina Sosial Ekonomi, dan Bina fisik Lingkungan.

Beragam jenis kegiatan telah dilakukan melalui Program Bina Sosial Pemberdayaan Masyarakat, antara lain penguatan kelembagaan dan pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial. Untuk program bina ekonomi dititikberatkan pada kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Kegiatan Bina Fisik lingkungan antara lain meliputi pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan penyediaan sarana kebersihan dan lain-lain. (bapemas.jatimprov.go.id)

Begitu pula dengan pemerintah kota Malang, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejak tahun 2012 telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat Kelurahan di kota Malang. Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kota dan menjalin hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan pemerintah daerah.

Kelurahan Dinoyo sebagai salah satu kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat memiliki dinamika masyarakat yang sangat majemuk. Hal ini terbukti bahwa Kelurahan Dinoyo dikelilingi oleh beberapa sekolah, perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta, rumas sakit, serta menjamurnya perumahan di wilayah Kelurahan Dinoyo . Berdasarkan data yang didapat di kantor Kelurahan Dinoyo dapat diketahui bahwa RW 01 sampai dengan RW 05 merupakan wilayah lama. Sedangkan RW 06 setengah wilayahnya masih penduduk perkampungan asli dan setengahnya lagi sudah dibangun menjadi perumahan. Sedangkan RW 07 merupakan wilayah baru yang merupakan wilayah perumahan.

Dengan adanya pola pergerakan masyarakat yang majemuk tersebut, ketepatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan menjadi suatu pemecahan masalah, hal ini

dikarenakan dari 7 (tujuh) RW yang ada di wilayah Kelurahan Dinoyo , RW 01 sampai dengan RW 05 dan setengah wilayah RW 06 penduduknya masih merupakan kawasan asli yang belum pernah mengalami pemugaran sehingga perlu diberikan bantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan permasalahan yang ada ini, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi pembangunan menurut Siagian (1985, h.2-3) meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan.

“Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).”

Dari pengertian administrasi dan pembangunan di atas, maka administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1991, h.9-10) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tujuh ciri yang ada dalam administrasi pembangunan. Ketujuh ciri tersebut adalah:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat di negara berkembang.
- b. Administrasi pembangunan berperan aktif terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya agar efektif.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
- d. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas khususnya pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
- e. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang.
- f. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparat pemerintah juga bisa menjadi agen penggerak perubahan (*change agents*).
- g. Lebih mengarah pada lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

3. Pembangunan Daerah

Terdapat beragam corak pemikiran, mengenai konsep pembangunan daerah yang multidimensional seperti menurut Nugroho (2007, h.62) sebagai berikut :

- a. *Life sustenance*, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan) bukan untuk “*to be more*” tetapi untuk mempertahankan hidup.
- b. *Self esteem*, pembangunan daerah harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia.
- c. *Liberation*, kebebasan setiap insan untuk berkembang (jiwa dan raga) dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah.

Konsep tersebut menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.

Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997, h.880), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur (Jayadinata, 1992) adalah merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai.

2. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Komarudin (1997, h.92) menyatakan bahwa tujuan pembangunan prasarana permukiman adalah:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur.
- b. Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan.
- c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib mendirikan bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana dari pengertian diatas pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya.

3. Komponen Sarana dan Prasarana

Budiharjo (1993) menyatakan bahwa yang sering terabaikan padahal sangat penting artinya bagi kelayakan hidup manusia penghuni lingkungan perumahan adalah sarana dan prasarana, yang meliputi:

- a. Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
- b. Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persema-yaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.
- c. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana bantuan langsung masyarakat

2. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya.
- c. Memanfaatkan institusi yang ada di masyarakat (Dewan Kelurahan), Kepengurusan RW, RT, BKM dan LPMK.
- d. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan bersama-sama melaksanakan program bantuan dari Pemerintah (*Matching Fund*).
- e. Menyiapkan kemampuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama

berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah.

3. Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang bermukim di RW-RW Kelurahan sasaran beserta institusi kemasyarakatan yang ada perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan.

4. Asas Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kemitraan: Menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.
- 2) Keadilan: Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama.
- 3) Kesederhanaan: Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun secara teknis.
- 4) Kesetaraan gender: Semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- 5) Kejujuran: Membuka hati nurani seluruh umat manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.

5. Prinsip Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Desentralisasi: Memberi kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal seperti RW, RT, BKM dan LPMK.
- 2) Akuntabilitas: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif.

- 3) Keberlanjutan: Hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan ditumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional.
- 4) Keterbukaan: Semua kegiatan dari awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 5) Partisipasi: Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.
- 6) Demokrasi: Partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman (2007, h.20) yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang, sedangkan situs penelitian adalah Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Dan yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: *pertama* proses pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang yang meliputi: (a) Tahap sosialisasi, (b) Tahap perencanaan, (c) Tahap pelaksanaan, (d) tahap pengawasan dan pemeliharaan. Fokus *kedua*, hasil yang telah dicapai dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang yang meliputi: (a) Pembangunan Pavingisasi, (b) Pembangunan Gorong-gorong. Fokus yang *terakhir*, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan sarana

prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo kota Malang yang meliputi: (a) Faktor pendukung, (b) Faktor penghambat

Pembahasan

Proses Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang

a. Tahap Sosialisasi

Dalam membangun sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan khususnya di Kelurahan Dinoyo Kota Malang tidak terlepas dari partisipasi dan keikutsertaan masyarakat sekitar yang merupakan aktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Tahap sosialisasi merupakan langkah pertama dalam mengenalkan kepada masyarakat sekitar tentang visi misi serta informasi lainnya seputar program tersebut.

Tahap sosialisasi dimulai dengan mengundang seluruh ketua RT, ketua RW, dan tokoh-tokoh masyarakat/sesepuh desa untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang anggaran yang diperoleh Kelurahan Dinoyo pada periode Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2012. Selain membicarakan tentang anggaran, masyarakat juga diberikan informasi mengenai tujuan dari program ini, yaitu:

- 1) Masalah pengelolaan sarana prasarana lingkungan.
- 2) Pengembangan kemampuan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pengembangan sistem pemantauan oleh masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.
- 4) Pengembangan kapasitas aparat pemerintah dan lembaga masyarakat.

b. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dapat dipisahkan dari peran dan pendapat masyarakat di dalamnya. Menurut Sutoro Eko (2003, h.18) dalam tulisannya yang berjudul "Melalui Perspektif Ekonomi Politik" menjelaskan tentang pentingnya partisipasi yang mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) *Voice* (suara), yakni setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan.
- 2) Akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan.
- 3) Kontrol, yakni setiap warga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Proses selanjutnya setelah dilaksanakan sosialisasi yaitu mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang membahas tentang perencanaan pembangunan dan menentukan skala prioritas untuk tiap wilayah di Kelurahan Dinoyo .

c. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Dinoyo harus sesuai dengan prosedur yaitu membentuk Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program ini. Tugas Pokmas adalah menampung aspirasi warga kelurahan, memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, menjelaskan kebijakan pemerintah kelurahan kepada warga kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dari proses awal hingga akhir.

Sedang pada tahap pelaksanaan, warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga. Senada dengan hal ini, Ericson (dalam Slamet, 1994, h.89) mengatakan bahwa partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimaksudkan adalah pelibatan seseorang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau pun material sebagai salah satu wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut. Maka dari itu, selain mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, ditambah pula dengan partisipasi masyarakat.

d. Tahap Pengawasan

Pengawasan dilakukan supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan program berlangsung. Dengan dilakukannya perencanaan serta

pelaksanaan oleh masyarakat, maka pengawasan/monitoring juga akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai keinginan masyarakat. Kegiatan pada tahapan monitoring ini penting sekali untuk memandu apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan model (blue print) yang telah ditetapkan (Soekartawi, 1990, h.105). Pengawasan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan yang terdiri dari staf kelurahan dan LPMK serta dibantu oleh masyarakat sekitar. Tugas dari tim ini yaitu memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Bentuk pengawasannya yaitu Tim Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan yang terdiri dari 8 orang dari pihak kelurahan dan LPMK datang langsung ke tempat pembangunan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali di tiap-tiap RW.

Hasil yang Telah Dicapai dari Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang

a. Pembangunan Pavingisasi

Pembangunan pavingisasi di Kelurahan Dinoyo dilaksanakan di 8 Pokmas yang tersebar di 8 wilayah Kelurahan Dinoyo. Pembangunan paving sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar yaitu jalan yang dulunya sering tergenang air saat musim penghujan datang sekarang sudah diperbaiki dan menjadi lebih rapi. Hal tersebut meningkatkan kenyamanan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Berikut ini rincian anggaran dana dan daftar warga yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan pavingisasi di masing-masing Pokmas:

1) Pokmas Rajawali

Pokmas Rajawali berada di Jalan MT. Haryono RW.01 RT.01 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 49,28 M² tersebut adalah 5.600.000 rupiah.

2) Pokmas Bakti Jaya

Pokmas Bakti Jaya berada di Jalan Gajayana 4A, RW.02 RT.02 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di

kawasan seluas 164,60 M² tersebut adalah 19.200.000 rupiah.

3) Pokmas Dinamika I

Pokmas Dinamika I berada di Jalan MT. Haryono XV, RW.03 RT.04 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 586,80 M² tersebut adalah 64.000.000 rupiah.

4) Pokmas Dinamika II

Pokmas Dinamika II berada di Jalan MT. Haryono IX-F, RW.03 RT.02 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 97,44 M² tersebut adalah 11.200.000 rupiah.

5) Pokmas Dinamika III

Pokmas Dinamika III berada di Jalan MT. Haryono IX-B, RW.03 RT.06 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 146,25 M² tersebut adalah 15.200.000 rupiah.

6) Pokmas Kanjuruhan

Pokmas Kanjuruhan berada di Jalan MT. Haryono X, RW.05 RT.04 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 83,75 M² tersebut adalah 9.600.000 rupiah.

7) Pokmas Sekar Jaya

Pokmas Sekar Jaya berada di Jalan MT. Haryono 19, RW.03 RT.03 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 916,00 M² tersebut adalah 101.200.000 rupiah.

8) Pokmas Sunan Kalijaga

Pokmas Sunan Kalijaga berada di Jalan Jalan Sunan Kalijaga RW.07 RT.02 Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk membangun paving di kawasan seluas 270,00 M² tersebut adalah 27.000.000 rupiah.

b. Pembangunan Gorong-gorong

Kegiatan pembangunan gorong-gorong ini dilaksanakan oleh Pokmas Rukun Jaya yang berada di RT. 06 & 07 RW IV Kelurahan Dinoyo Kota Malang. Latar belakang

diadakannya pembangunan gorong-gorong disana adalah karena seringnya terjadi banjir di sekitar Jalan MT Haryono VI-C dikarenakan kondisi saluran yang sudah tidak mencukupi lagi kapasitasnya. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh upah kerja bila ikut serta dalam pembangunan gorong-gorong ini.

Gorong-gorong / saluran drainase juga perlu dirancang dengan baik agar saluran pembuangan limbah menjadi lancar. Cara yang bisa dilakukan adalah memasang saluran buis beton 30 cm guna menghindari banjir yang dapat memenuhi dan menyumbat pembuangan limbah rumah tangga.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang.

a. Faktor Pendukung

Antusiasme warga masyarakat ditunjukkan dengan kesediaan warga mengikuti seluruh proses pembangunan dari awal yaitu perencanaan, lalu ke pelaksanaan program sampai pada tahap pengawasan. Memang masih ada warga yang beranggapan gengsi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan kuli. Akan tetapi masih banyak warga yang antusias dan mau ikut serta dalam pembangunan di lingkungan mereka.

Pemberian upah kerja kepada warga yang ikut membangun adalah salah satu faktor yang membuat warga tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan mendapatkan upah kerja tersebut maka mereka bisa menambah penghasilan mereka dan sedikit meningkatkan perekonomian keluarganya.

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan diadakannya pembangunan sarana prasarana lingkungan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo. Para warga yang ikut terlibat adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan mereka yang membutuhkan upah tambahan untuk menghidupi keluarganya.

b. Faktor Penghambat

Pada tahapan awal perencanaan program pemberdayaan masyarakat, diadakan rapat Musrenbangkel yang salah satu

agendanya adalah membentuk kelompok-kelompok masyarakat / Pokmas yang nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pembangunan di wilayah yang sudah ditentukan. Akan tetapi, masih ada warga yang belum bisa membaaur dengan warga lain di Pokmasnya.

Masalah lain yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini adalah kurangnya minat anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Kebanyakan dari mereka merasa gengsi atau malu karena harus melakukan pekerjaan seperti tukang atau kuli. Padahal nantinya upah kerja yang diberikan pemerintah dapat membantu perekonomian keluarganya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Malang telah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat Kelurahan di kota Malang. Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kota dan menjalin hubungan yang harmonis antar masyarakat dengan pemerintah daerah.

Hasil yang dapat ditemukan dalam penelitian ini pada pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat banyak menunjukkan hasil yang telah dicapai selama proses pelaksanaannya, salah satunya dalam hal menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengajarkan masyarakat akan pentingnya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Disisi lain juga memberikan manfaat berupa fasilitas/ sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan sehari-hari warga dan pemberian upah kerja bagi warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehingga kesimpulan dari pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun demikian masih perlu adanya kesinambungan yang harus ditingkatkan serta intensitasnya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah dan pihak Kelurahan Dinoyo sendiri. Dan apabila terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dicari

pemecahannya. Maka dari itu, ada baiknya pembangunan sarana prasarana lingkungan sebagai wujud pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya kesinambungan atau berkelanjutan sehingga masyarakat dapat lebih lancar dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, Eko. (1992) **Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan**. Bandung, Alumni.
- Budihardjo, Eko. (1993) **Kota Berwawasan Lingkungan**. Bandung, Alumni.
- Jayadinata, Johara T. (1992) **Tata Guna dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah**. Bandung, ITB.
- Kodoatie, Robert J. (2005) **Pengantar Manajemen Infrastruktur**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Komarudin (1997) **Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman**. Jakarta, Yayasan Realestat Indonesia PT Rakasindo.
- Miles, Mattew, B,S, Huberman, A, Michael. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, UI Press.
- Nugroho, Trilaksono. (2007) **Teori Administrasi Publik, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah**. Malang, FIA UB.
- Siagian Sondang P. (1985) **Filsafat Administrasi**. Jakarta, Gunung Agung.
- Slamet, Y. (1994) **Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi**. Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Soekartawi (1990) **Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan**. Jakarta, Rajawali.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999) **Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS**. Jakarta, Gramedia.
- Sutoro, Eko (ed). (2005) **Pemberdayaan Kaum Marginal**. Yogyakarta, APMD Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1991) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, Midas Surya Grafindo.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** [Internet] Available from <www.bapemas.jatimprov.go.id> [Accessed 16 Maret 2013]